

GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA DESA DALAM MEMBANGKITKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MEMUNCULKAN INOVASI LOKAL (Studi di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten BanjarNEGARA Provinsi Jawa Tengah)

Albertus¹, Yuli Setyowati²

¹Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

²Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
Jl. Timoho No 317 Yogyakarta

*Correspondent Author:

Abstrak

Penelitian ini menganalisis gaya kepemimpinan transformasional yang dapat dilihat dari idealisasi, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual, pertimbangan individual dan implikasinya dalam memunculkan inovasi lokal dan membangkitkan partisipasi masyarakat pada sektor pembangunan Desa Purwasaba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena sosial yang kompleks seperti gaya kepemimpinan, inovasi lokal, serta partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Purwasaba berhasil membangun kepercayaan dan keteladanan, menginspirasi masyarakat dengan visi yang jelas, serta mendorong partisipasi aktif melalui komunikasi dan pendekatan inklusif dalam proses pembangunan. Pendekatan ini turut mendorong kreativitas dan inovasi lokal termasuk pengembangan desa wisata, BUMDes, dan sistem pertanian terintegrasi yang berdampak positif pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pelestarian budaya. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan inovasi lokal dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, serta adaptif terhadap tantangan lokal dan global.

Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional, Partisipasi Masyarakat, Inovasi Lokal, Pembangunan Desa.

Abstract

This study analyzes transformational leadership styles that can be seen from idealization, inspiration motivation, intellectual stimulation, individual considerations and their implications in generating local innovation and generating community participation in the development sector of Purwasaba Village. This study uses qualitative methods with a case study approach to explore in depth complex social phenomena such as leadership styles, local innovation, and community participation. The results showed that the head of Purwasaba village managed to build trust and example, inspire the community with a clear vision, and encourage active participation through communication and inclusive approach in the development process. This approach also encourages local creativity and innovation including the development of tourism villages, BUMDes, and integrated agricultural systems that have a positive impact on social welfare, economy, and cultural preservation. Overall, this leadership style increases community participation and creates local innovations in village development that are sustainable, inclusive, and adaptive to local and global challenges.

Keywords: Transformational Leadership, Community Participation, Local Innovation, Village Development.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan Kepala Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari pengelolaan administrasi, perencanaan dan penganggaran, hingga penyediaan pelayanan publik yang efektif dan transparan. Tujuan utama kepemimpinan kepala desa adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya, melalui gaya kepemimpinan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Desa Purwasaba menekankan pada inovasi lokal dan partisipasi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan Kepala Desa, Hoho Alkaf. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh penampilan, melainkan oleh tindakan nyata, integritas, dan hasil yang dicapai. Peran Kepala Desa sebagai pimpinan formal sekaligus penggerak pembangunan menunjukkan penerapan kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi dan menggerakkan masyarakat menuju perubahan positif.

Kepemimpinan transformasional menekankan penciptaan visi bersama, inspirasi, dan kerja kolektif untuk mendorong perubahan berkelanjutan. Melalui visi yang jelas, motivasi, stimulasi intelektual, dan perhatian terhadap kebutuhan individu, kepemimpinan ini mendorong lahirnya inovasi lokal di berbagai sektor pembangunan Desa Purwasaba, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Pemimpin transformasional mampu mengomunikasikan visi pembangunan secara efektif sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat, menumbuhkan pemikiran kritis, kreativitas, dan solusi inovatif, serta membangun hubungan saling percaya melalui perhatian terhadap aspirasi dan kebutuhan warga. Kepemimpinan transformasional, partisipasi masyarakat, dan inovasi lokal saling berkaitan dan saling menguatkan; tanpa dukungan masyarakat dan inovasi nyata, kepemimpinan transformasional sulit diwujudkan secara berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan Desa Purwasaba di bawah kepemimpinan Hoho Alkaf juga tercermin dalam program nyata, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa, pengembangan jaringan irigasi pertanian, penguatan BUMDes melalui unit usaha peternakan ikan lele dan ikan nila, serta pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Program-program ini menunjukkan integrasi antara perencanaan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun Hoho Alkaf dikenal memiliki penampilan nyentrik dengan tubuh bertato, hal ini tidak mengurangi efektivitas kepemimpinannya. Sebaliknya, integritas, konsistensi kebijakan, dan kedekatannya dengan warga membangun legitimasi sosial; masyarakat merasa termotivasi untuk berpartisipasi, menghargai transparansi pengelolaan dana desa, dan menilai kepala desa sebagai “teladan nyata” karena tindakan dan hasil kerjanya lebih berbicara dibandingkan penampilan fisiknya. Fenomena ini menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan lebih ditentukan oleh kapasitas, komitmen, dan kinerja nyata dibandingkan penampilan fisik semata.

Temuan empiris dari penelitian terdahulu juga memperkuat hal tersebut. Penelitian Andarista (2023) menunjukkan bahwa penerapan dimensi keteladanan, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual pada kepala desa mendorong keterlibatan perangkat dan masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya, Farleni (2023) membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan inovasi dan kesehatan organisasi melalui visi yang jelas, budaya kolaboratif, dan komunikasi efektif. Selain itu, Lestari *et al.* (2025) menemukan bahwa kepemimpinan transformasional efektif dalam pengembangan BUMDes, meningkatkan partisipasi warga, dan berdampak positif terhadap kesejahteraan, meskipun stimulasi intelektual dan konsistensi visi perlu diperkuat. Mohulaingo *et al.* (2022) juga menegaskan hubungan positif yang sangat signifikan antara kepemimpinan transformasional dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menetapkan Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) sebagai subjek kajian untuk menganalisis secara komprehensif penerapan kepemimpinan transformasional dalam pembangunan desa, khususnya dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan pengembangan inovasi berbasis potensi lokal. Fokus kajian ini diarahkan untuk

mengidentifikasi serta mengkonstruksi bagaimana gaya kepemimpinan transformasional Kepala Desa dalam membangkitkan partisipasi masyarakat dan memunculkan inovasi lokal

KAJIAN TEORI

Konsep Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada perubahan dan transformasi organisasi melalui inspirasi, motivasi, dan pemberdayaan pengikut (Bass & Riggio, 2006). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Burns (1978) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bass (1985) dalam konteks organisasi. Kepemimpinan transformasional berbeda dengan kepemimpinan transaksional karena tidak hanya berfokus pada pertukaran reward dan punishment, tetapi lebih pada transformasi nilai, visi, dan aspirasi pengikut (Northouse, 2019).

Karakteristik utama pemimpin transformasional meliputi kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut melampaui kepentingan pribadi mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar (Judge & Piccolo, 2004). Pemimpin transformasional juga memiliki karisma yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi pengikut melalui kekuatan pribadi dan visi yang compelling (Conger & Kanungo, 1998). Mereka mampu menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan pengikut dan membangun kepercayaan yang mendalam (Avolio & Bass, 2004).

Dalam konteks pemerintahan desa, kepemimpinan transformasional menjadi sangat relevan karena tuntutan untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam pelayanan publik (Tummers & Knies, 2013). Kepala Desa sebagai pemimpin transformasional diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat tentang pembangunan desa dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan (Vigoda-Gadot & Beerli, 2012). Transformasi ini tidak hanya terjadi pada level individual tetapi juga pada level komunitas dan institusi desa secara keseluruhan.

Bass dan Avolio (1994) mengidentifikasi empat dimensi utama kepemimpinan transformasional yang dikenal dengan "*Four I's*": *Idealized Influence*, *Inspirational Motivation*, *Intellectual Stimulation*, dan *Individualized Consideration*. Dimensi *Idealized Influence* mencakup perilaku pemimpin yang menjadi role model bagi pengikutnya dengan menunjukkan standar etika dan moral yang tinggi (Avolio *et.al.*, 1999). Pemimpin dengan *idealized influence* memiliki integritas, dapat dipercaya, dan konsisten dalam tindakannya, sehingga mendapat respek dan admiration dari pengikutnya.

Inspirational Motivation merujuk pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut melalui visi yang jelas dan menarik tentang masa depan (Bass, 1999). Pemimpin dengan dimensi ini mampu mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi, menggunakan simbol dan bahasa yang emotionally appealing, serta menunjukkan komitmen terhadap tujuan dan visi bersama (Shamir *et.al.*, 1993). Mereka juga mampu membangkitkan team spirit dan optimisme di antara pengikutnya.

Intellectual Stimulation adalah kemampuan pemimpin untuk merangsang kreativitas dan inovasi pengikut dengan menantang asumsi-asumsi lama dan mendorong cara berpikir yang baru (Sosik *et.al.*, 1997). Pemimpin dengan dimensi ini tidak mengkritik kesalahan pengikut secara publik, tetapi mendorong mereka untuk mencari solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi (Jung *et al.*, 2003). Mereka juga mendorong pengikut untuk mempertanyakan status quo dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru.

Individualized Consideration menunjukkan perhatian pemimpin terhadap kebutuhan individual pengikut dan bertindak sebagai mentor atau coach (Bass & Riggio, 2006). Pemimpin dengan dimensi ini mampu mengenali perbedaan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi setiap pengikut, serta memberikan dukungan personal yang sesuai (Dvir *et.al.*, 2002). Mereka menciptakan lingkungan yang supportive dimana setiap individu dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.

Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan

nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat (Widjaja, 2003). Struktur pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan desa (Nurcholis, 2011). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Widjaja, 2003).

Fungsi utama pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan desa, penetapan dan pelaksanaan APBDes, penataan dan penetapan kelembagaan dan pengaturan desa, pembinaan kehidupan masyarakat desa, dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa (Widjaja, 2003). Dalam melaksanakan fungsi ini, pemerintahan desa harus mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas (Antlov, 2003).

Fungsi pembangunan desa mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat (Sutoro & Zakaria, 2005). Pembangunan desa harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi lokal dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat (Turner *et.al*, 2003).

Fungsi pembinaan kemasyarakatan meliputi pembinaan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah desa, pembinaan kehidupan beragama, pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, pembinaan ekonomi masyarakat, pembinaan dan pengembangan pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana (Hadiz, 2004). Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dalam berbagai aspek kehidupan (Nurcholis, 2011).

Fungsi pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi, berorganisasi, dan mengendalikan pembangunan desa secara mandiri (Widjaja, 2003). Pemberdayaan ini dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban masyarakat, fasilitasi implementasi hak dan perwujudan kewajiban masyarakat, serta pendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa (Antlov, 2003).

Tantangan utama yang dihadapi pemerintahan desa saat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengelola pemerintahan modern (Nurcholis, 2011). Banyak Kepala Desa dan perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan teknologi informasi (Widjaja, 2003). Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan desa

Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi program atau kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Arnstein, 1969). Konsep partisipasi menekankan pada pembagian kekuasaan dan kontrol antara pemerintah dengan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan (Pretty, 1995). Partisipasi bukan sekedar konsultasi atau memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses pembangunan dari tahap perencanaan hingga evaluasi (Chambers, 1994).

Dalam perspektif pemberdayaan, partisipasi dipandang sebagai proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan mengimplementasikannya secara mandiri (Ife, 2002). Partisipasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat (Craig & Mayo, 1995). Proses partisipatif yang baik dapat memperkuat *citizenship* dan *democratic governance* pada tingkat lokal.

Dalam konteks pembangunan desa, bentuk partisipasi yang paling relevan adalah partisipasi yang mengkombinasikan berbagai tingkatan dan bentuk sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik masyarakat desa (Mansuri & Rao, 2004). Tidak semua isu memerlukan tingkatan partisipasi yang sama, dan tidak semua anggota masyarakat memiliki kemampuan atau keinginan untuk berpartisipasi pada tingkatan yang sama (Arnstein, 1969). Fleksibilitas dan adaptabilitas dalam merancang mekanisme partisipasi menjadi kunci keberhasilannya.

Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi karakteristik sosio-demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi (Pretty, 1995). Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi lebih aktif karena memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu pembangunan dan cara-cara untuk mempengaruhinya (Chambers, 1994). Status sosial ekonomi juga berpengaruh karena masyarakat yang lebih mapan secara ekonomi memiliki waktu dan *resources* yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (Cornwall, 2008).

Konsep Inovasi Lokal

Inovasi lokal merupakan proses penciptaan, pengembangan, dan implementasi ide-ide baru yang disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik spesifik suatu lokalitas (Lundvall & Johnson, 1994). Konsep inovasi lokal menekankan pada pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan geografis setempat dalam proses inovasi (Edquist, 2005). Inovasi lokal berbeda dengan inovasi global karena fokusnya pada penyelesaian masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh komunitas lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan yang tersedia secara lokal.

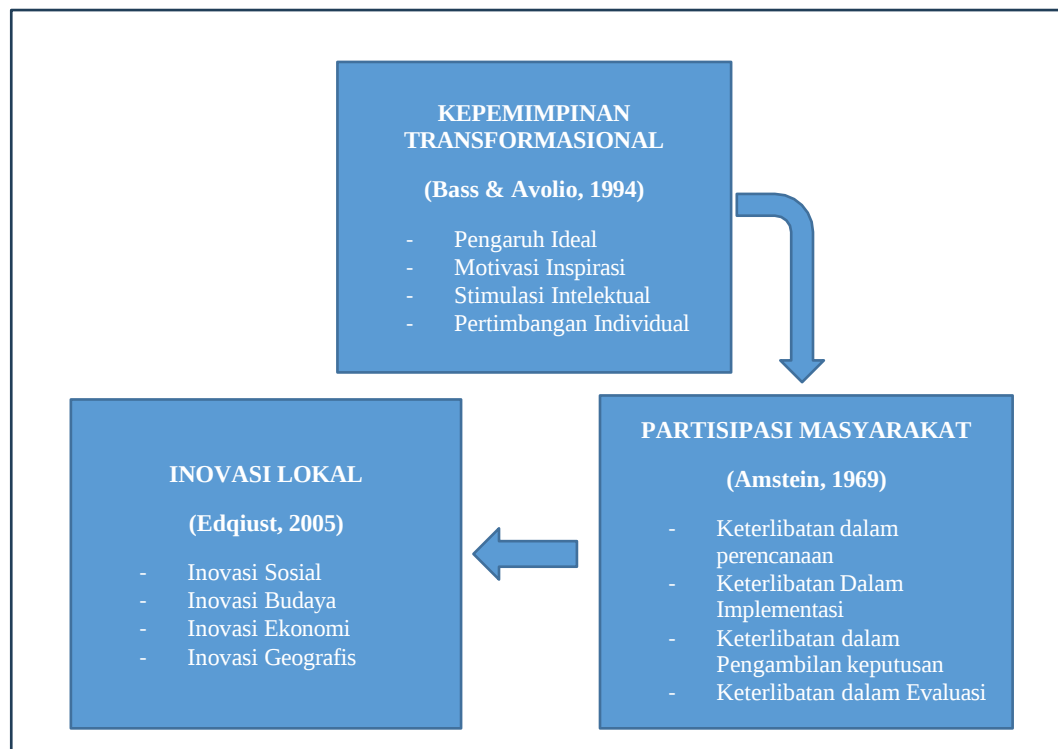
Dalam konteks pembangunan desa, inovasi lokal menjadi sangat penting karena setiap desa memiliki potensi, permasalahan, dan karakteristik yang unik (Putnam *et.al.*, 1993). Inovasi yang berhasil di satu desa belum tentu dapat diterapkan langsung di desa lain tanpa adaptasi sesuai dengan kondisi lokal (Storper, 1997). Oleh karena itu, kemampuan untuk mengembangkan inovasi lokal menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Inovasi lokal juga berperan dalam memperkuat identitas dan jati diri desa karena memanfaatkan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional sebagai basis pengembangan (Lundvall & Johnson, 1994). Hal ini berbeda dengan pendekatan pembangunan *top-down* yang seringkali mengabaikan konteks lokal dan dapat mengancam kelestarian budaya setempat (Edquist, 2005).

Sistem inovasi lokal merupakan jaringan institusi, organisasi, dan individu yang saling berinteraksi dalam proses penciptaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi pada tingkat lokal (Cooke & Morgan, 1998). Sistem ini mencakup berbagai aktor seperti pemerintah desa, lembaga pendidikan dan penelitian, organisasi masyarakat, pelaku usaha lokal, dan masyarakat pada umumnya (Freeman, 1995). Interaksi antar aktor ini menciptakan *learning networks* yang memfasilitasi proses pembelajaran kolektif dan *knowledge sharing*.

Faktor pendukung utama inovasi lokal adalah ketersediaan *leadership* yang *visioner* dan mampu memfasilitasi proses inovasi (Freeman, 1995). Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses inovasi dan memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak (Nelson, 1993). Kepemimpinan yang transformasional khususnya sangat penting karena dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi inovatif (Porter, 1998).

Berdasarkan uraian kajian teori diatas, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut;



Gambar1: Kerangka Pikir

Sumber: Olahan Peneliti

Kerangka konseptual di atas menggambarkan hubungan yang saling terkait antara kepemimpinan transformasional, partisipasi masyarakat, dan inovasi lokal dalam perencanaan dan implementasi program. Kepemimpinan transformasional, melalui pengaruh ideal, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap program, seperti perencanaan, implementasi, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Partisipasi yang meningkat ini kemudian memicu munculnya inovasi lokal yang relevan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografis, yang pada gilirannya memastikan relevansi dan keberlanjutan program. Inovasi yang dihasilkan memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan transformasional, menciptakan siklus yang berkelanjutan yaitu kepemimpinan mendorong partisipasi, partisipasi menghasilkan inovasi, dan inovasi meningkatkan kepercayaan serta dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis temuan penelitian dengan menilai bagaimana interaksi antar konsep di atas memengaruhi keberhasilan program dan dampaknya terhadap masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kepemimpinan transformasional Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) dalam mendorong inovasi lokal dan partisipasi masyarakat. Desa Purwasaba dipilih secara purposif karena memiliki kepemimpinan yang inovatif, berbagai inisiatif pembangunan, dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sebanyak 5 orang berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, yaitu Kepala Desa, perwakilan perangkat desa, perwakilan tokoh pemuda, perwakilan ibu PKK, dan perwakilan warga masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara

mendalam dan observasi partisipatif, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen desa, laporan pembangunan, media massa, dan literatur terkait. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumen tertulis. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara interaktif dan berkelanjutan (Qomaruddin & Sa'diyah, H., 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan antarvariabel, dan memastikan interpretasi data akurat serta dapat dipertanggungjawabkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kepemimpinan Hoho Alkaf, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Purwasaba berjalan secara administratif dan cenderung konvensional. Kepala Desa pada periode sebelumnya lebih berfokus pada pelaksanaan program-program rutin yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, seperti pembangunan fisik dasar dan pelayanan administrasi desa. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa pada masa tersebut masih relatif terbatas. Masyarakat umumnya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, bukan sebagai subjek yang aktif terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Musyawarah desa memang tetap dilaksanakan, namun keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan gagasan atau inovasi pembangunan. Selain itu, pengelolaan potensi ekonomi desa belum dikembangkan secara maksimal. BUMDes belum berfungsi secara optimal sebagai penggerak ekonomi desa, sehingga potensi lokal yang dimiliki Desa Purwasaba belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi desa pada masa tersebut masih terbatas dan belum terarah pada pengembangan jangka panjang.

Kepemimpinan Desa Purwasaba saat ini berada di bawah kepemimpinan Hoho Alkaf sebagai Kepala Desa. Dalam menjalankan perannya, Hoho Alkaf menunjukkan karakter kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan berorientasi pada perubahan. Kepemimpinan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Hoho Alkaf dikenal sebagai pemimpin yang aktif berinteraksi dengan masyarakat, terbuka terhadap masukan, serta mampu menginspirasi warga desa untuk terlibat secara langsung dalam berbagai program pembangunan. Pola kepemimpinan yang diterapkan mencerminkan ciri-ciri kepemimpinan transformasional, yaitu kemampuan untuk membangun visi bersama, mendorong inovasi, serta memotivasi masyarakat untuk berkontribusi demi kemajuan desa.

Dalam kepemimpinannya, Kepala Desa tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator dan penggerak perubahan. Hal ini terlihat dari upaya Kepala Desa dalam melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemuda, kelompok tani, kelompok usaha, dan lembaga desa lainnya, dalam setiap tahapan pembangunan.

Gaya Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan transformasional adalah pendekatan kepemimpinan yang fokus pada perubahan dan pengembangan individu serta organisasi. Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai potensi terbaik mereka, baik secara pribadi maupun profesional. Mereka bukan hanya memimpin dengan memberi instruksi atau arahan, tetapi lebih pada mendorong inovasi, perubahan positif, dan perkembangan nilai-nilai yang lebih tinggi. Menurut Bass dan Avolio (1994), terdapat empat dimensi utama kepemimpinan transformasional yang dikenal dengan "*Four I's*", yaitu *Idealized Influence*, *Inspirational Motivation*, *Intellectual Stimulation*, dan *Individualized Consideration*.

a. Pengaruh Ideal (*Idealized Influence*)

Dalam kepemimpinan transformasional, pengaruh ideal (*idealized influence*) berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam membangun kepercayaan, rasa hormat, serta keteladanan melalui integritas dan perilaku etis. Dalam hal ini, pemimpin dipersepsikan sebagai panutan yang konsisten antara nilai yang dianut dan tindakan yang dilakukan. Berdasarkan temuan penelitian

menyatakan bahwa Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) membangun kepercayaan warga melalui transparansi anggaran desa dan keterlibatan langsung dalam proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan desa. Hoho Alkaf menekankan pentingnya menjadi teladan dalam kejujuran, disiplin, dan etika bertutur sapa menggunakan bahasa *kromo* kepada orang tua.

Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menjalankan kepemimpinan yang berlandaskan kepercayaan, integritas, etika, dan keteladanan. Kepercayaan dibangun melalui kehadiran langsung, sikap terbuka, dan kemampuan mendengarkan warga tanpa membedakan latar belakang politik. Musyawarah mufakat dan transparansi anggaran menunjukkan integritas dan komitmen untuk kepentingan bersama.

Hoho Alkaf juga menerapkan kepemimpinan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, memperkuat rasa memiliki dan hubungan emosional antara pemimpin dan warga. Nilai budaya lokal, kedisiplinan, kejujuran, dan kerja keras diwujudkan melalui tindakan nyata sehari-hari, bukan sekadar kata-kata.

Temuan ini sejalan dengan konsep *Idealized Influence*. Avolio *et al.* (1999) menyatakan bahwa pemimpin dengan dimensi ini menjadi role model, menunjukkan integritas dan moral tinggi, sehingga memperoleh respek dan kekaguman dari pengikutnya.

b. Motivasi Inspirasi (*Inspirational Motivation*)

Dalam kepemimpinan transformasional, motivasi inspirasi (*inspirational motivation*) berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam mengomunikasikan visi yang jelas, menarik, dan mampu membangkitkan semangat serta optimisme pengikutnya. Pemimpin pada dimensi ini mendorong terciptanya komitmen kolektif melalui pesan yang mudah dipahami dan keteladanan dalam tindakan. Temuan penelitian menyatakan bahwa Visi pembangunan Desa Purwasaba dikomunikasikan sebagai mimpi bersama melalui pertemuan formal dan informal serta pemanfaatan media sosial. Contoh nyata keberhasilannya adalah membangkitkan semangat gotong royong warga untuk membangun BUMDes dan desa wisata meskipun awalnya terdapat keterbatasan dana dan pandangan peimis dari warga dan perangkat desa.

Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menekankan bahwa visi pembangunan desa harus menjadi tujuan bersama, bukan sekadar dokumen formal. Visi ini disampaikan melalui komunikasi intensif, pertemuan formal dan informal, serta media sosial dan *website* desa agar mudah dipahami dan memotivasi masyarakat. Kepala Desa berperan sebagai teladan, bekerja langsung bersama warga, sehingga menumbuhkan semangat gotong royong dan partisipasi dalam program seperti BUMDes dan desa wisata. Pendekatan ini berhasil mewujudkan program yang bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori *Inspirational Motivation*. Bass (1999) menyatakan bahwa pemimpin mampu menginspirasi pengikut melalui visi yang jelas dan menarik, sedangkan Shamir *et al.* (1993) menekankan pentingnya komunikasi emosional, komitmen nyata, dan membangkitkan optimisme serta semangat kolektif.

c. Stimulasi Intelektual (*Stimulation Intellectual*)

Dalam kepemimpinan transformasional, stimulasi intelektual (*intellectual stimulation*) menekankan peran pemimpin dalam mendorong pola pikir kritis, kreativitas, dan inovasi dalam menghadapi berbagai persoalan. Pemimpin menciptakan ruang yang terbuka bagi munculnya gagasan baru serta menghargai kritik dan saran sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Temuan penelitian menyatakan bahwa Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) mendorong kreativitas dengan membuka ruang bagi ide-ide baru melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan forum diskusi *online*. Inovasi yang lahir dari proses ini adalah pembentukan kelompok kerja pemuda untuk pengelolaan pariwisata.

Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menerapkan kepemimpinan yang mendorong kreativitas, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Kepala Desa menciptakan ruang terbuka bagi ide baru, menyelenggarakan pelatihan, *workshop*, dan forum diskusi untuk menggali potensi desa serta menyelesaikan masalah, seperti terbentuknya kelompok kerja pemuda di bidang pariwisata. Dalam pengelolaan anggaran dan kelembagaan, prinsip transparansi dan partisipasi dijalankan melalui Musyawarah Desa serta media *daring*, sehingga ide, kritik, dan saran warga ditampung,

dikaji, dan dijadikan program bermanfaat. Kritik masyarakat diterima sebagai “vitamin” untuk evaluasi dan perbaikan, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

Pendekatan ini sejalan dengan teori *Intellectual Stimulation*. Sosik *et al.* (1997) menyatakan bahwa pemimpin mendorong kreativitas dan inovasi pengikut dengan menantang asumsi lama, sedangkan Jung *et al.* (2003) menekankan bahwa pemimpin mendorong pengikut mencari solusi kreatif tanpa mengkritik kesalahan secara publik.

d. Pertimbangan Individual (*Individual Consideration*)

Dalam kepemimpinan transformasional, pertimbangan individual (*individual consideration*) menekankan perhatian pemimpin terhadap kebutuhan, potensi, dan kondisi masing-masing individu maupun kelompok dalam masyarakat. Pemimpin berperan sebagai pendengar yang aktif serta fasilitator yang memastikan setiap warga memperoleh kesempatan dan perlakuan yang setara. Penerapan aspek ini dalam kepemimpinan Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) tercermin dalam temuan penelitian yaitu bahwa terdapat upaya pendekatan langsung melalui kunjungan ke rumah warga untuk memahami kebutuhan spesifik, seperti bantuan bagi lansia dan pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga.

Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menunjukkan kepemimpinan yang peduli sosial dan inklusif, dengan pendekatan langsung kepada warga melalui kunjungan dan komunikasi personal untuk memahami kebutuhan individu maupun kelompok, khususnya yang kurang tersentuh bantuan pemerintah. Hoho Alkaf juga membentuk tim relawan untuk mengumpulkan data kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program tepat sasaran, seperti pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga dan bantuan bagi lansia. Dalam penyusunan APBDes, forum terbuka melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk kelompok rentan, sehingga aspirasi warga menjadi pertimbangan utama dalam alokasi anggaran. Hoho Alkaf aktif mendukung pengembangan potensi masyarakat melalui mentoring, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan keterlibatan tenaga ahli, serta memastikan program ramah disabilitas dan inklusif bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pendekatan ini sejalan dengan teori Bass & Riggio (2006) tentang *Individualized Consideration*, di mana pemimpin memperhatikan kebutuhan dan aspirasi tiap individu serta menciptakan lingkungan mendukung perkembangan personal.

Upaya Gaya Kepemimpinan Transformasional Yang Dapat Membangkitkan Partisipasi Masyarakat

Menurut Arnstein (1969), Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi program atau kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berikut ini adalah hasil kajian peneliti terkait empat komponen tersebut, yaitu;

1. Keterlibatan dalam Perencanaan

Dalam perencanaan pembangunan desa, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan program sesuai kebutuhan dan aspirasi warga. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menjelaskan bahwa setiap rencana pembangunan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes), di mana warga menyampaikan masukan yang dipertimbangkan secara cermat. Kepala Desa menerapkan pendekatan pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat aktif dalam perencanaan, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Musdes berfungsi sebagai forum resmi untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan terkait pembangunan desa. Untuk memastikan representasi yang adil, Hoho Alkaf membentuk tim perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan, pemuda, petani, dan penyandang disabilitas. Tim ini menyampaikan aspirasi yang kemudian dibahas dalam Musdes. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk perencanaan pembangunan yang inklusif dan representatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) sejalan dengan teori partisipasi masyarakat. Craig & Mayo (1995) mengemukakan bahwa konteks sosial budaya mempengaruhi partisipasi, yang tercermin dalam kebijakan Kepala Desa yang melibatkan kelompok marginal. Teori Kumar (2002) tentang masyarakat hierarkis dan patriarkis juga

relevan, karena Kepala Desa memberi kesempatan pada perempuan dan kelompok terpinggirkan untuk berpartisipasi. Pemahaman Kepala Desa terhadap norma sosial (Mansuri & Rao, 2004) tercermin dalam kebijakan yang mendorong perubahan norma untuk menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif dan adil.

2. Keterlibatan dalam Implementasi

Dalam perencanaan pembangunan desa, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan program sesuai kebutuhan dan aspirasi warga. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menjelaskan bahwa setiap rencana pembangunan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes), di mana warga menyampaikan masukan yang dipertimbangkan secara cermat. Hoho Alkaf menerapkan pendekatan pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat aktif dalam perencanaan, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Musdes berfungsi sebagai forum resmi untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan terkait pembangunan desa.

Untuk memastikan representasi yang adil, Hoho Alkaf membentuk tim perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan, pemuda, petani, dan penyandang disabilitas. Tim ini menyampaikan aspirasi yang kemudian dibahas dalam Musdes. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk perencanaan pembangunan yang inklusif dan representatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) sejalan dengan teori partisipasi masyarakat. Craig & Mayo (1995) mengemukakan bahwa konteks sosial budaya mempengaruhi partisipasi, yang tercermin dalam kebijakan Hoho Alkaf yang melibatkan kelompok marginal. Teori Kumar (2002) tentang masyarakat hierarkis dan patriarkis juga relevan, karena Kepala Desa memberi kesempatan pada perempuan dan kelompok terpinggirkan untuk berpartisipasi. Pemahaman Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) terhadap norma sosial (Mansuri & Rao, 2004) tercermin dalam kebijakan yang mendorong perubahan norma untuk menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif dan adil.

Dalam implementasi pembangunan desa, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan program efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menjelaskan bahwa warga didorong untuk berpartisipasi melalui gotong royong dan partisipasi langsung, serta diberi ruang untuk menyampaikan ide dan usulan dalam setiap tahap proyek. Pemerintah desa mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pertemuan warga di balai desa. Sosialisasi program pembangunan rutin dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok sosial lainnya.

Keterlibatan warga juga diwujudkan dalam setiap tahap pelaksanaan proyek, baik pembangunan infrastruktur, program kesehatan, maupun pendidikan. Gotong royong menjadi bentuk nyata partisipasi, terutama dalam pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi desa. Selain itu, pemerintah desa membentuk kelompok kerja berdasarkan keahlian warga, seperti infrastruktur, kebersihan lingkungan dan kesehatan, untuk mempercepat pelaksanaan program dan memastikan efektivitas kerja.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) tidak hanya mengandalkan kebijakan dari atas, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan. Partisipasi yang terstruktur melalui Musdes, sosialisasi, gotong royong, dan kelompok kerja yang mencerminkan teori Cornwall (2008) bahwa partisipasi meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan. White (1996) juga menyatakan bahwa program yang melibatkan masyarakat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, yang terlihat dalam Musdes sebagai ruang untuk menampung ide dan masukan warga. Putnam (1993) menegaskan bahwa partisipasi meningkatkan relevansi dan penerimaan program, yang tercermin dari tingginya keterlibatan warga dalam gotong royong dan kelompok kerja. Sen (1999) menyatakan bahwa partisipasi memperkuat komitmen masyarakat terhadap implementasi program, terbukti dengan meningkatnya rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan.

3. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan pembangunan desa, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Kepala Desa Purwasaba, Hoho Alkaf, menjelaskan bahwa warga rutin dilibatkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan pertemuan perwakilan kelompok masyarakat, sehingga semua saran dan pendapat dipertimbangkan serius. Kepala Desa menerapkan pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan kebijakan dan program desa, dengan Musdes sebagai forum terbuka yang memberikan kesempatan bagi seluruh warga untuk menyampaikan pendapat.

Musdes berfungsi tidak hanya sebagai sarana diskusi, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi kebijakan desa. Setiap kebijakan dan program dibahas dalam forum ini sebelum ditetapkan, dan penyuluhan dilakukan untuk memastikan warga memahami tujuan, manfaat, dan dampak kebijakan. Kepala Desa juga mengadakan pertemuan dengan perwakilan kelompok masyarakat, seperti ibu-ibu, pemuda, dan kelompok keagamaan, untuk memperoleh masukan yang lebih spesifik.

Selain itu, media komunikasi nonformal dan digital, seperti grup *WhatsApp* desa dan papan pengumuman, digunakan untuk konsultasi publik. Warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan secara fleksibel, dan untuk keputusan cepat, pertemuan langsung atau rapat terbatas tetap dibuka. Semua masukan yang diterima dipertimbangkan sebelum keputusan akhir ditetapkan, mencerminkan pengambilan keputusan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian mendukung teori-teori tentang partisipasi masyarakat. Cornwall (2008) dan White (1996) menunjukkan dimensi politik partisipasi yang tercermin dalam Musdes, di mana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan. Dimensi sosial terlihat dalam kegiatan gotong royong dan pembentukan kelompok kerja yang memperkuat modal sosial, sebagaimana diungkapkan Putnam (1993). Dalam dimensi ekonomi, menurut Sen (1999), partisipasi dalam pembangunan infrastruktur meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi. Penelitian ini mendukung teori-teori tersebut, karena partisipasi di Desa Purwasaba mencakup ketiga dimensi untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Keterlibatan dalam Evaluasi

Dalam evaluasi pembangunan desa, keterlibatan masyarakat penting untuk menilai keberhasilan program dan merumuskan perbaikan ke depan. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menjelaskan bahwa warga dilibatkan melalui survei, forum diskusi, dan pertemuan terbuka untuk mendapatkan umpan balik yang dapat meningkatkan efektivitas program. Evaluasi dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat langsung sebagai pihak yang merasakan dampak program. Survei digunakan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat secara sistematis, sementara forum diskusi dan pertemuan terbuka menjadi ruang untuk membahas hasil survei bersama-sama. Hoho Alkaf juga berdiskusi dengan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pandangan lebih mendalam mengenai manfaat program dan kesesuaiannya dengan kebutuhan warga. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah desa dalam membangun evaluasi yang transparan dan berbasis pengalaman langsung masyarakat.

Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Jika program dinilai kurang efektif, penyebabnya dianalisis dan dijadikan dasar perbaikan pada program berikutnya. Program yang berhasil akan dikembangkan agar manfaatnya lebih luas. Evaluasi juga digunakan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dan pelayanan publik. Dengan demikian, evaluasi menjadi bagian dari siklus perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian mendukung teori-teori *governance*. Pretty (1995) menjelaskan bahwa partisipasi dalam evaluasi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tercermin dalam pelibatan masyarakat melalui survei, forum diskusi, dan pertemuan terbuka. Chambers (1994) menyatakan bahwa partisipasi dalam monitoring dan evaluasi dapat mengurangi potensi korupsi, yang terlihat dalam transparansi evaluasi di Desa Purwasaba. Cornwall (2008) juga menunjukkan bahwa partisipasi memperkuat responsivitas pemerintah, yang terbukti dengan perbaikan

berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Pendekatan ini mendukung terciptanya *good governance* dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat.

Dampak Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Munculnya Inovasi Lokal

Menurut Edquist (2005), konsep inovasi lokal menekankan pada pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan geografis setempat dalam proses inovasi. Berikut ini akan diuraikan lebih dalam mengenai empat konsep tersebut berdasarkan hasil temuan peneliti, yaitu;

1. Inovasi Sosial

Inovasi sosial merupakan strategi penting dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menjelaskan bahwa beberapa inovasi sosial telah berhasil diimplementasikan, termasuk pengembangan desa wisata, pengelolaan BUMDes, dan perbaikan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga dan mempermudah akses terhadap layanan dasar. Inovasi sosial di Desa Purwasaba berfokus pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, dan kualitas pelayanan sosial. Perbaikan infrastruktur, seperti jalan desa, irigasi pertanian, dan akses ke sawah, mempermudah distribusi hasil panen. Penyediaan mobil ambulan desa juga meningkatkan layanan kesehatan, terutama dalam keadaan darurat.

Desa wisata dan BUMDes melibatkan masyarakat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Masyarakat tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama. Partisipasi ini terwujud melalui pelatihan keterampilan, seperti pemandu wisata dan pengelolaan produk lokal, serta keterlibatan dalam manajemen BUMDes. Keputusan terkait pengembangan desa wisata dan BUMDes dibuat melalui musyawarah bersama, mencerminkan prinsip demokratis dan partisipatif.

Inovasi sosial ini telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa wisata dan BUMDes membuka peluang pendapatan tambahan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Peningkatan infrastruktur pendukung, seperti penerangan jalan, fasilitas sanitasi, dan air bersih, juga berdampak positif. Selain itu, peningkatan pendapatan desa memungkinkan penguatan layanan kesehatan, seperti perawatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan kerja sama dengan puskesmas.

Inovasi ini juga meningkatkan partisipasi sosial dan solidaritas. Gotong royong dalam pengelolaan wisata, pemeliharaan lingkungan, dan pembangunan desa semakin intensif, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Selain itu, inovasi sosial ini mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial dengan memberi kesempatan yang setara bagi perempuan dan kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa. Dengan demikian, inovasi sosial di Desa Purwasaba tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.

2. Inovasi Budaya

Inovasi budaya merupakan strategi penting dalam pembangunan desa untuk melestarikan warisan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menjelaskan bahwa salah satu inovasi budaya yang diterapkan adalah Pasar Canggung, yang menyajikan jajanan tradisional UMKM dengan sistem transaksi menggunakan koin jadul. Program ini tidak hanya melestarikan tradisi kuliner sehat dan higienis, tetapi juga melibatkan generasi muda serta berbagai kelompok masyarakat dalam pengelolaan budaya lokal.

Pasar Canggung berfokus pada pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal, menghadirkan kuliner tradisional, menggunakan koin jadul untuk transaksi, dan mewajibkan pengelola memakai pakaian adat Jawa. Inovasi ini memperkuat identitas budaya dan menyesuakannya dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Pasar Canggung telah memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap budaya lokal, memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda tentang kuliner, seni, dan tradisi desa. Kegiatan seperti pertunjukan tari, musik

gamelan, dan pameran kerajinan turut memperkaya citra Desa Purwasaba sebagai desa dengan kekayaan budaya yang khas.

Inovasi ini juga berdampak positif pada pelestarian budaya, memotivasi masyarakat untuk memproduksi dan memasarkan produk budaya seperti kerajinan tangan. Kegiatan seni budaya rutin membantu menjaga tradisi lokal agar tetap relevan di era modern. Selain itu, budaya lokal dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan apresiasi pengunjung memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap identitas budayanya. Pasar Cangu juga menjadi ruang dialog antarbudaya, mendorong kolaborasi dengan seniman dan komunitas luar desa, serta meningkatkan toleransi dan saling menghormati antarbudaya. Ini menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan terbuka. Selain itu, Pasar Cangu memberi ruang bagi seniman desa untuk menampilkan karya seni mereka, mendukung regenerasi pelaku seni, dan memperkuat ekosistem budaya desa. Inovasi ini membuka peluang interaksi antara budaya lokal dan budaya global, dengan wisatawan dari luar daerah dan mancanegara membawa budaya Desa Purwasaba lebih dikenal. Masyarakat belajar beradaptasi dengan pengaruh global sambil menjaga nilai-nilai lokal, menciptakan sinergi antara tradisi dan modernitas.

3. Inovasi Ekonomi

Inovasi ekonomi merupakan strategi penting dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan potensi lokal. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menjelaskan bahwa desa wisata dikembangkan sebagai inovasi ekonomi utama dengan memanfaatkan potensi alam seperti perbukitan dan lahan pertanian. Inovasi ini mengintegrasikan kearifan lokal, budaya tradisional, kuliner khas desa, serta fasilitas pendukung seperti kolam renang, mini zoo, dan kafe untuk menarik wisatawan dari berbagai daerah.

Desa wisata di Purwasaba berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal, dengan memanfaatkan potensi alam dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata. Pengembangan desa wisata tidak hanya menciptakan sumber pendapatan baru, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat desa. Fasilitas seperti kolam renang, mini zoo, dan kafe memperluas layanan wisata, meningkatkan lama kunjungan dan pengeluaran wisatawan.

Inovasi ini juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan pekerjaan musiman. Warga kini bekerja sebagai pemandu wisata, pengelola parkir, penjual tiket, petugas kebersihan, dan penjaga keamanan, yang menunjukkan pergeseran ekonomi desa menuju sektor jasa dan pariwisata. Selain itu, pengembangan desa wisata berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM. Usaha mikro seperti kerajinan tangan, souvenir, dan kuliner lokal mengalami peningkatan omzet yang signifikan, bahkan mencapai sekitar 50%. Pelatihan kewirausahaan bagi warga meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha, sehingga beberapa UMKM mampu menggandakan pendapatannya.

Dari sisi investasi, desa wisata berhasil menarik dukungan dari pemerintah daerah dan investor swasta untuk pembangunan infrastruktur wisata, seperti jalan desa, tempat parkir, dan fasilitas umum. Investasi ini memperkuat keberlanjutan desa wisata dan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan.

4. Inovasi Geografis

Inovasi geografis menjadi strategi penting dalam pembangunan desa untuk memanfaatkan potensi lahan dan sumber daya alam secara optimal. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menjelaskan bahwa pengelolaan lahan pertanian sawah yang luas dilakukan melalui berbagai inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sistem pertanian terintegrasi diterapkan dengan menggabungkan penanaman padi, budidaya ikan (lele, nila), dan ayam petelur, sehingga limbah ikan menjadi pupuk alami yang meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, sistem irigasi dan kanal air dikembangkan untuk efisiensi penggunaan air yang lebih berkelanjutan, sementara pola tanam mulai beralih ke pertanian organik untuk menjaga kualitas tanah dan ekosistem.

Desa Purwasaba memanfaatkan kondisi geografis berupa lahan sawah luas sebagai basis pembangunan berkelanjutan. Sistem pertanian terintegrasi ini meningkatkan hasil pertanian dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Limbah ikan yang digunakan sebagai pupuk alami memperbaiki kesuburan tanah, sementara pengelolaan irigasi yang terencana memastikan penggunaan air lebih efisien, responsif terhadap kondisi fisik wilayah desa. Selain itu, peralihan ke pertanian organik membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif lingkungan. Pengurangan penggunaan pupuk kimia dan pestisida menurunkan potensi pencemaran tanah dan air, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengelolaan limbah pertanian juga mengurangi polusi, dengan jerami padi dan sisa hasil pertanian yang diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanah, menggantikan praktik pembakaran yang merusak udara.

Inovasi ini turut meningkatkan ketahanan desa terhadap perubahan iklim. Sistem irigasi yang efisien dan pengelolaan air yang bijaksana memungkinkan lahan pertanian tetap produktif meskipun menghadapi musim kemarau panjang atau cuaca ekstrem, sehingga meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian desa.

Dampak Inovasi Lokal Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Untuk memahami pengaruh inovasi lokal terhadap tata kelola pemerintahan desa, peneliti meninjau penerapan inovasi ekonomi dan sosial di Desa Purwasaba, khususnya melalui pengembangan desa wisata dan BUMDes. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada pelibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan ekonomi desa. Inovasi ekonomi ini memberikan dampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Pengelolaan desa wisata, selain meningkatkan pendapatan masyarakat, juga mendorong keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan. Transparansi meningkat karena kebijakan dan kegiatan terkait desa wisata dan BUMDes dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan rapat terbuka, memberikan masyarakat akses langsung terhadap informasi program, pengelolaan usaha, dan penggunaan dana desa. Hal ini memperkuat akuntabilitas pemerintah desa, karena setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Inovasi desa wisata juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Aktivitas ekonomi yang meningkat dan terserapnya tenaga kerja lokal memungkinkan pemerintah desa untuk lebih fokus pada peran fasilitator dan pengarah pembangunan. Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih responsif berkat komunikasi yang intens antara pemerintah desa dan warga. Dari sisi akses informasi, inovasi ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait layanan dan program pemerintahan desa. Kegiatan sosialisasi, rapat BUMDes, dan pertemuan warga menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi dan menyerap aspirasi masyarakat.

Fungsi Utama Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan membina kehidupan bermasyarakat secara tertib, demokratis, dan partisipatif. Menurut Widjaja (2003), fungsi utama pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan desa, penetapan dan pelaksanaan APBDes, penataan dan penetapan kelembagaan dan pengaturan desa, pembinaan kehidupan masyarakat desa, dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Di bawah ini akan dibahas lebih dalam mengenai fungsi pemerintahan desa berdasarkan temuan peneliti di Desa Purwasaba yaitu sebagai berikut;

1. Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Desa

Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat sangat penting untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menekankan pentingnya melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemuda, ibu-ibu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, agar kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama.

Pemerintah Desa Purwasaba menerapkan pendekatan partisipatif dan responsif dalam memastikan kebijakan desa selaras dengan kebutuhan masyarakat. Proses perumusan kebijakan dimulai dengan survei dan Musyawarah Desa (Musdes) secara berkala, sehingga kebijakan yang diambil berasal dari kebutuhan nyata warga, bukan bersifat *top-down*. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui Musdes terbuka dan inklusif, memberi kesempatan yang sama bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan usulan. Selain forum tatap muka, pemerintah desa juga memanfaatkan media komunikasi seperti papan pengumuman, grup *WhatsApp*, dan forum daring untuk menjangkau aspirasi lebih luas.

Dalam hal komunikasi kebijakan, prinsip transparansi diterapkan dengan menyampaikan setiap kebijakan secara terbuka melalui berbagai saluran informasi. Sosialisasi dan pelatihan dilakukan untuk memastikan pemahaman yang sama di kalangan warga, dan mekanisme tanya jawab serta umpan balik disediakan untuk menghindari kesalahpahaman. Evaluasi efektivitas kebijakan dilakukan rutin melalui rapat evaluasi yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Indikator kinerja yang disepakati dalam Musdes digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Jika ditemukan kebijakan yang kurang efektif, pemerintah desa akan melakukan penyesuaian atau perubahan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari warga.

2. Penetapan dan Pelaksanaan APBDes

Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat sangat penting untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menekankan pentingnya melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemuda, ibu-ibu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, agar kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Pemerintah Desa Purwasaba menerapkan pendekatan partisipatif dan responsif dalam memastikan kebijakan desa selaras dengan kebutuhan masyarakat. Proses perumusan kebijakan dimulai dengan survei dan Musyawarah Desa (Musdes) secara berkala, sehingga kebijakan yang diambil berasal dari kebutuhan nyata warga, bukan bersifat *top-down*.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, agar alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Penyusunan APBDes di Desa Purwasaba mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Transparansi diwujudkan dengan mengumumkan rencana dan realisasi anggaran melalui papan pengumuman dan media komunikasi desa, serta rutin mempresentasikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang menjadi forum utama untuk menyampaikan usulan terkait prioritas pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi. Kelompok masyarakat juga difasilitasi untuk mengajukan kebutuhan anggaran sesuai sektor yang mereka kelola. Penetapan alokasi anggaran mempertimbangkan keseimbangan antar sektor pembangunan, dengan menggunakan data survei dan masukan masyarakat sebagai dasar untuk menentukan prioritas anggaran yang objektif dan sesuai dengan kondisi desa.

Dalam pelaksanaan APBDes, pengawasan dilakukan oleh tim pengawasan internal yang terdiri dari aparat desa, perwakilan masyarakat, dan tokoh masyarakat. Setiap kegiatan yang dibiayai anggaran desa dilaporkan secara berkala kepada warga. Selain pengawasan internal, mekanisme kontrol sosial diterapkan, di mana masyarakat dapat mengakses laporan keuangan dan memberikan masukan jika terdapat ketidaksesuaian. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui Musdes terbuka dan inklusif, memberi kesempatan yang sama bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan usulan. Selain forum tatap muka, pemerintah desa juga

memanfaatkan media komunikasi seperti papan pengumuman, grup *WhatsApp*, dan forum daring untuk menjangkau aspirasi lebih luas.

Dalam hal komunikasi kebijakan, prinsip transparansi diterapkan dengan menyampaikan setiap kebijakan secara terbuka melalui berbagai saluran informasi. Sosialisasi dan pelatihan dilakukan untuk memastikan pemahaman yang sama di kalangan warga, dan mekanisme tanya jawab serta umpan balik disediakan untuk menghindari kesalahpahaman. Evaluasi efektivitas kebijakan dilakukan rutin melalui rapat evaluasi yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Indikator kinerja yang disepakati dalam Musdes digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Jika ditemukan kebijakan yang kurang efektif, pemerintah desa akan melakukan penyesuaian atau perubahan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari warga.

3. Penataan dan Penetapan Kelembagaan dan Pengaturan Desa

Penataan kelembagaan desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pemerintahan desa. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dan keterlibatan masyarakat dalam setiap keputusan terkait kelembagaan, agar lembaga desa dapat bekerja sesuai kebutuhan warga dan perubahan yang terjadi. Penataan kelembagaan di Desa Purwasaba bertujuan meningkatkan efektivitas dan responsivitas lembaga desa terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa membentuk struktur organisasi yang jelas, dengan setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi spesifik, sehingga mendukung pembangunan desa secara terarah dan efisien. Kejelasan tugas dan wewenang setiap lembaga diatur dalam peraturan desa dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah desa juga mendorong sinergi antar lembaga, seperti kolaborasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa, serta kerja sama antara kelompok pemberdayaan masyarakat dan lembaga pendidikan. Pelibatan masyarakat dalam proses penataan kelembagaan dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang rutin dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga dan memberikan masukan terkait perbaikan struktur kelembagaan. Forum diskusi terbuka juga disediakan untuk menampung aspirasi warga, sehingga kelembagaan desa dapat lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Selain penataan kelembagaan, pengelolaan sumber daya desa juga menjadi perhatian utama pemerintah desa. Sumber daya alam seperti tanah, air, dan hutan dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Pemanfaatan tanah desa diarahkan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan fasilitas umum dan kawasan wisata desa. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, pemerintah desa membentuk kelompok pengelola air dan hutan yang bertugas memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab.

4. Pembinaan Kehidupan Masyarakat

Pembinaan kehidupan masyarakat merupakan fokus utama dalam pembangunan desa, karena kualitas hidup warga mencerminkan keberhasilan tata kelola pemerintahan desa. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menekankan pentingnya program yang menyentuh aspek kesehatan, keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi agar warga dapat mandiri dan sejahtera. Pemerintah Desa Purwasaba melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mencakup pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program pelatihan keterampilan menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa agar lebih mandiri dan produktif.

Di bidang kesehatan, pemerintah desa menjalankan program kesehatan desa yang meliputi pemeriksaan kesehatan berkala dan vaksinasi. Program ini penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit, sehingga warga dapat beraktivitas ekonomi dan sosial dengan optimal. Pemerintah desa juga melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam pembinaan kehidupan sosial melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan pertemuan rutin. Tokoh-tokoh ini berperan sebagai penggerak dan pemberi teladan dalam menanamkan nilai-nilai positif terkait pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai moral dan sosial. Nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kerukunan antarwarga terus dipromosikan melalui kegiatan sosial seperti kerja bakti dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Selain itu,

pemerintah desa menyelenggarakan perayaan budaya desa untuk memperkuat kebersamaan dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

Pemerintah desa juga memperhatikan pengembangan potensi lokal dan pelestarian kearifan tradisional melalui pelatihan seni dan festival budaya. Kegiatan ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui produk lokal seperti kerajinan tangan, pertanian organik, dan kuliner khas desa.

5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa

Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas kehidupan di desa. Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) menekankan pentingnya komunikasi terbuka, edukasi, dan kerja sama dengan aparat terkait untuk memastikan keamanan dan kepatuhan warga terhadap peraturan desa. Pemerintah Desa Purwasaba menerapkan pendekatan partisipatif dan preventif dalam menjaga ketertiban. Salah satu langkah utamanya adalah mengadakan pertemuan rutin dengan warga untuk membahas masalah desa seperti keamanan, kebersihan, dan potensi konflik sosial. Melalui komunikasi yang intensif, masalah dapat diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik besar. Selain itu, pemerintah desa juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan desa melalui pelatihan dan sosialisasi berkala, bertujuan agar warga memahami hak dan kewajiban mereka, menciptakan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan. Program pencegahan kerusakan lingkungan juga dijalankan sebagai bagian dari upaya menjaga kenyamanan bersama. Pemerintah desa melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial. Tokoh-tokoh ini berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan sosial, sementara kerja sama dengan Polsek dan Koramil diwujudkan dalam program desa aman untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan hukum. Pembentukan satuan tugas keamanan desa yang melibatkan warga juga memperlihatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.

Penyelesaian konflik dilakukan dengan prinsip musyawarah dan keadilan. Tokoh agama dan tokoh masyarakat sering menjadi mediator untuk menenangkan situasi dan mencari solusi yang adil. Pendekatan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung perdamaian dan keharmonisan sosial. Pemerintah desa juga menerapkan sanksi sosial edukatif untuk penegakan norma sosial, yang bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab warga, bukan menghukum. Bentuk sanksi ini termasuk teguran dan kewajiban melakukan pelayanan sosial.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, pemerintah desa secara rutin melakukan sosialisasi hukum, melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam menyampaikan nilai hukum dan etika sosial. Edukasi juga diberikan kepada generasi muda melalui program pembinaan pemuda, agar mereka memahami pentingnya hukum, ketertiban, dan keamanan. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pembangunan Desa Purwasaba menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan praktik kepemimpinan transformasional yang dijalankan oleh Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf). Penekanan pada inovasi lokal, evaluasi berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan indikator utama dari kepemimpinan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga visioner dan transformatif.

Pertama, dari aspek pengaruh ideal (*idealized influence*), kepemimpinan Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) tercermin melalui keteladanan dalam tindakan nyata, bukan sekadar simbol atau penampilan. Meskipun memiliki penampilan yang berbeda dari norma kepemimpinan pada umumnya, Hoho Alkaf mampu menunjukkan integritas, komitmen, dan konsistensi dalam mengawal pembangunan desa. Hal ini terlihat dari keterlibatan langsung Kepala Desa dalam pendampingan BUMDes, termasuk menghadirkan tenaga ahli seperti dokter hewan secara rutin. Tindakan ini membangun kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan rasa hormat, sehingga Kepala Desa menjadi figur yang mampu menginspirasi warga untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa.

Kedua, dari dimensi visi dan inspirasi (*inspirational motivation*), Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) berhasil mengkomunikasikan arah pembangunan desa yang menekankan pada kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Visi tersebut diwujudkan melalui penguatan BUMDes dan pengembangan desa wisata sebagai inovasi lokal. Evaluasi rutin yang dilakukan setiap bulan menunjukkan bahwa visi pembangunan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap permasalahan yang muncul. Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi desa seperti grup WhatsApp, memperlihatkan bahwa visi pembangunan desa telah dipahami dan diterima oleh masyarakat sebagai tujuan bersama.

Ketiga, dari sudut pandang stimulasi intelektual (*intellectual stimulation*), Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) mendorong munculnya pemikiran kritis dan solusi inovatif dalam pengelolaan pembangunan desa. Mekanisme evaluasi yang dimulai dari tingkat RT dan RW, kemudian diseleksi oleh tim desa, mencerminkan adanya ruang diskusi dan pertukaran gagasan secara terbuka. Kehadiran narasumber ahli, seperti dokter hewan, juga menunjukkan upaya Kepala Desa dalam memperkaya pengetahuan masyarakat dan pengelola BUMDes agar mampu menyelesaikan permasalahan teknis secara rasional dan berbasis keahlian. Pola ini memperkuat kapasitas masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berpikir kritis dan solutif.

Keempat, dimensi pertimbangan individual (*individualized consideration*) tercermin dari perhatian Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) terhadap kebutuhan dan potensi berbagai kelompok masyarakat. Pengelolaan desa wisata yang melibatkan pemuda melalui Pokdarwis, ibu-ibu PKK, serta warga lainnya menunjukkan adanya upaya inklusif dalam pembangunan. Setiap kelompok diberikan ruang dan peran sesuai dengan kapasitasnya, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Akses masyarakat terhadap hasil evaluasi dan informasi program juga memperkuat hubungan saling percaya antara pemerintah desa dan warga.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) telah memenuhi karakteristik utama kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini tidak hanya mampu menggerakkan aparatur desa, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat secara luas, menciptakan inovasi lokal, serta memastikan bahwa hasil evaluasi benar-benar digunakan sebagai dasar perbaikan program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Desa Purwasaba tidak terlepas dari peran kepemimpinan transformasional Kepala Desa yang mampu mentransformasikan visi menjadi tindakan nyata dan berdampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu hasil penelitian terdahulu secara umum mendukung dan selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Purwasaba. Penelitian Andarista (2023), Farleni (2023), dan Mohulaingo *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional Kepala Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, inovasi, serta efektivitas pembangunan desa. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian saat ini yang membuktikan bahwa penerapan *Idealized Influence*, *Inspirational Motivation*, *Intellectual Stimulation*, dan *Individualized Consideration* oleh Kepala Desa Purwasaba mampu membangkitkan partisipasi aktif masyarakat dan mendorong keterlibatan warga dalam seluruh proses pembangunan desa.

Penelitian Lestari *et al.* (2025) dan Puspitasari *et al.* (2022) yang menekankan peran kepemimpinan transformasional dalam pengembangan dan tata kelola BUMDes juga mendukung hasil penelitian saat ini, khususnya pada temuan mengenai munculnya inovasi lokal seperti pengembangan BUMDes, desa wisata, UMKM, dan pasar desa. Kesamaan hasil terlihat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, transparansi, serta partisipasi warga sebagai dampak langsung dari gaya kepemimpinan transformasional.

Temuan Salwa *et al.* (2025) serta Mayzzah dan Dwiatmanto (2023) yang menyatakan bahwa kepemimpinan efektif dan demokratis berkontribusi pada kinerja organisasi, tata kelola yang baik, dan partisipasi masyarakat juga memperkuat hasil penelitian ini. Penelitian di Desa Purwasaba memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kepemimpinan

transfasional tidak hanya meningkatkan kinerja dan partisipasi, tetapi juga melahirkan inovasi lokal yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transfasional Kepala Desa terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong inovasi, serta memperkuat efektivitas pembangunan desa. Temuan penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa penerapan nilai keteladanan, motivasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individual mampu menciptakan tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sekaligus memperluas kajian terdahulu dengan menunjukkan bahwa kepemimpinan transfasional tidak hanya berdampak pada aspek tertentu, tetapi secara komprehensif menjadi fondasi pembangunan desa berbasis inovasi lokal dan partisipatif yang berkelanjutan di Desa Purwasaba.

KESIMPULAN

Gaya kepemimpinan transfasional Kepala Desa Purwasaba (Hoho Alkaf) tercermin dalam kepercayaan, integritas, keteladanan, dan etika kerja yang diwujudkan melalui visi yang jelas, komunikasi intensif, serta keterlibatan langsung dalam pembangunan desa. Penerapan *Idealized Influence*, *Inspirational Motivation*, *Intellectual Stimulation*, dan *Individualized Consideration* mendorong partisipasi aktif masyarakat, kreativitas, serta inovasi melalui mekanisme partisipatif dan pendekatan inklusif. Dampaknya terlihat pada munculnya inovasi lokal di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, seperti pengembangan BUMDes, desa wisata, UMKM, pasar Cangu, dan pertanian terintegrasi, yang secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan kualitas pembangunan Desa Purwasaba.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarista, M.F., & Kriswibowo, A. (2023). Kepemimpinan Transfasional Kepala Desa dalam Inovasi pembangunan Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 8 (1).
- Antlov, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2004). *Multifactor leadership questionnaire: Manual and sampler set* (3rd ed.). Mind Garden.
- Avolio, B. J., Bass, B. M., & Jung, D. I. (1999). Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership Questionnaire. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 72(4), 441-462.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.
- Bass, B. M. (1999). Two decades of research and development in transformational leadership. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 8(1), 9-32.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Sage Publications.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Chambers, R. (1994). *The origins and practice of participatory rural appraisal*. *World Development*, 22(7), 953-969.

- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'participation': Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269-283.
- Edquist, C. (Ed.). (2005). *Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations*. Routledge.
- Farleni, F., & Hanafi, S., (2023). Dampak Kepemimpinan Transpormasional Terhadap Inovasi Dan Sehatnya Organisasi. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, 4 (3).
- Freeman, C. (1995). The 'national system of innovation' in historical perspective. *Cambridge Journal of Economics*, 19(1), 5-24.
- Ife, J. (2002). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (2nd ed.). Longman.
- Jailani, M. S. (2020). Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Primary Education Journal (PEJ)*, 4(2), 19–23.
- Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity. *Journal of Applied Psychology*, 89(5), 755-768.
- Jung, D. I., Chow, C., & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. *The Leadership Quarterly*, 14(4-5), 525-544.
- Lundvall, B. Å., & Johnson, B. (1994). The learning economy. *Journal of Industry Studies*, 1(2), 23-42.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2004). Community-based and -driven development: A critical review. *The World Bank Research Observer*, 19(1), 1-39.
- Mayzzah, D., & Dwiatmanto. (2023). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Depok Trenggalek. *Jurnal pendidikan Dewantara*, 9 (2).
- Mohulaingo, M., Podungge, R., & Bokingo, A.H. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transpormasional Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5 (1).
- Nia Ayu Lestari, *et.al* (2025). Implementasi Kepemimpinan Transpormasional Kepala Desa Dalam Mengembangkan BUMDes Di Desa Gandusari. *Jurnal Dinamically*, 1 (1), 28-39.
- Northouse, P. G. (2019). *Leadership: Theory and practice* (8th ed.). Sage Publications.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Porter, M. E. (1998). *Clusters and the new economics of competition*. Harvard Business Review, 76(6), 77-90.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247-1263.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Puspitasari, M., Ardiansyah, & Hapsari, A.N.S. (2022). Mampukah gaya Kepemimpinan Mendorong Pengelolaan Keuangan BUMDes Yang Akuntabel Dan Transparan? *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 273-295.
- Qomaruddin & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77-84.
- Salwa, A., Saefudin, E.A., Ramadan, M.R., Hotimah, N., Widiyanti, & ramadan S.J. (2025). Efek gaya Kepemimpinan Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi dan Partisipasi Masyarakat. *Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science, Technology And Educational Research*, 2 (1), 124-134

- Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. *Organization Science*, 4(4), 577-594.
- Sosik, J. J., Kahai, S. S., & Avolio, B. J. (1997). Effects of leadership style and anonymity on group potency and effectiveness in a group decision support system environment. *Journal of Applied Psychology*, 82(1), 89-103.
- Storper, M. (1997). *The regional world: Territorial development in a global economy*. Guilford Press.
- Sutoro, E., & Zakaria, R. Y. (2005). *Kompleksitas permasalahan otonomi daerah di Indonesia*. Institute for Research and Empowerment.
- Tummers, L., & Knies, E. (2013). Leadership and meaningful work in the public sector. *Public Administration Review*, 73(6), 859-868.
- Vigoda-Gadot, E., & Beerli, I. (2012). Change-oriented organizational citizenship behavior in public administration: The power of leadership and the cost of organizational politics. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(3), 573-596.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. PT Raja Grafindo Persada.